



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KOTA PEMATANGSIANTAR  
TAHUN 2023**

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PEMATANGSIANTAR**  
JL. WR. SUPRATMAN NO. 4 PEMATANGSIANTAR

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Senantiasa kami panjatkan Kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena atas limpahan rahmat, karunia serta Penyertaannya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Pembangunan daerah merupakan salah sub system dari Pembangunan Nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan local, nasional dan global.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar untuk tahun 2022-2027 mendukung visi dan misi Wali Kota Pematangsiantar, terutama pada misi ke 3 (tiga) yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsif melayani berdasarkan prinsip *good governance* dan *good corporate governance*. Pada misi ini terdapat satu tujuan, yaitu mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan. Untuk tujuan ini ada 3 sasaran yang ingin dicapai yaitu : 1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik, dengan indikator kinerja : a. Indeks Kepuasan Masyarakat, b. Indeks SPBE.

Tujuan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023 dimaksud sebagai pedoman/acuan bagi bidang-bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, pelaksanaan kebijakan, mengelola kinerja mulai dari perencanaan strategis, perencanaan kinerja, perjanjian kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja.

Demikian disampaikan, kami berharap kegiatan maupun program yang dituangkan dalam dokumen ini dapat terlaksana dan acuan untuk pembangunan dalam tahap selanjutnya, dan kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam Penyusunan LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar Tahun 2023

Pematangsiantar,

2024

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA KOTA PEMATANGSIANTAR**

**JOHANNES SIHOMBING, S.STP, M.Si**  
NIP. 198106251999121001



## DAFTAR ISI

### KATA PENGANTAR

### DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Penjelasan Umum Organisasi.....	1
1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	3
1.3. Data Umum Organisasi.....	6
1.3.1. Personil.....	6
1.3.2. Sarana dan Prasarana.....	7
1.3.3. Pembiayaan.....	10
1.4. Isu Strategis.....	12
1.4.1. Landasan Hukum.....	13
1.4.2. Sistematika Penyajian.....	14
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>15</b>
2.1. Rencana Strategis.....	15
2.2. Indikator Kinerja Utama.....	20
2.3. Rencana Kinerja Tahun 2023.....	21
2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	23
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>26</b>
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	29
3.1.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023.....	29
3.1.2. Perbandingan antara target dan realisasi Kinerja Tahun ini....	30
3.1.3 Perbandingan realisasi Kinerja membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.....	33
3.1.4 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;.....	34
3.1.5 Analisis Penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.....	34
3.1.6 Analisis atas Efisiensi penggunaan sumber daya.....	35
3.1.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian	

pernyataan kinerja.....	40
3.2. Realisasi Anggaran.....	47
BAB IV PENUTUP.....	49
4.1. Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja.....	49
4.2. Kendala dan Hambatan Pencapaian Kinerja.....	50
4.3. Strategi Pemecahan Masalah.....	50

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Penjelasan Umum Organisasi

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar Tahun 2023, merupakan tindak lanjut atas ketentuan dalam UU 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang secara substansi mempresentasikan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dalam rangka mewujudkan good governance, berdasarkan prinsip transparansi, partisipasi, efektif dan efisien, akuntabel dan berkelanjutan, diperlukan manajemen strategis yang menempatkan organisasi pada titik yang strategis, sehingga

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagai bentuk penyempurnaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan dikeluarkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), keberhasilan suatu instansi pemerintah lebih dilihat dari kemampuan instansi tersebut, berdasarkan sumber daya yang dikelolanya untuk mencapai hasil, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Petunjuk teknis ini dipergunakan sebagai pedoman bagi setiap instansi pemerintah dalam Menyusun Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada Tingkat Kementerian, Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak.

Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimasi sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung

secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pemerintah Daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah diwajibkan untuk Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai kinerja Organisasi Perangkat Daerah serta Pemerintah Daerah sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar menyusun LAKIP Tahun 2023 sebagai media pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2023. Dengan adanya laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2023, dapat mempertanggungjawabkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar kepada Wali Kota Pematangsiantar dan pihak yang berkepentingan (stakeholder), dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (good governance) yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas, serta sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja internal Dinas Komunikasi dan Informatika untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Diskominfo Kota Pematangsiantar di tahun selanjutnya.

Dinas Komunikasi dan Informatika adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam menentukan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang statistik dan bidang Persandian. Dinas Komunikasi dan Informatika dibentuk berdasarkan kebutuhan, perkembangan dan kemajuan di Bidang Pemerintahan serta kemajuan teknologi dewasa ini, dalam rangka membantu pemerintah daerah melaksanakan pembangunan, khususnya di Bidang Pemerintahan. Sesuai dengan Pemerintahan daerah yang di atur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah seiring dengan perkembangan masyarakat yang semakin kompleks Undang-Undang tersebut di lakukan amandemen yang pertama menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 adalah amandemen yang kedua.

Pengertian pemerintah daerah di atur dalam Bab 1 pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah yang berbunyi : "Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembuat dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", pemerintah daerah, telah memberikan wewenang dan keleluasaan bagi Pemerintah Daerah untuk merencanakan dan menetapkan sepenuhnya kebijakan dan program daerahnya. Dengan adanya otonomi daerah maka Pemerintahan daerah dituntut lebih mandiri, sehingga berbagai perintis pembangunan daerah kearah tujuan dan kesuksesan akan menjadi agenda penting yang harus disiapkan pemerintah oleh pemerintah daerah.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar , adalah lembaga teknis daerah dibidang Komunikasi dan informatika, bidang persandian, bidang statistik yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Dinas ini mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Pematangsiantar adalah salah satu lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar yang merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah. Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar diatur pada Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar

## **1.2 Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar merupakan salah satu lembaga teknis daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar yang melaksanakan urusan Komunikasi dan informatika, urusan persandian serta urusan persandian. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan unsur pemerintahan yang meliputi bidang

komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Diskominfo mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- a. Penyusunan Kebijakan teknis pengelolaan komunikasi, informasi, statistik dan persandian;
- b. Penyusunan rencana program dan anggaran informasi komunikasi publik pemerintah kota;
- c. Pelaksanaan pengkajian lingkup urusan pemerintahan bidang pengelolaan informasi dan komunikasi, statistik dan persandian pemerintah kota;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pengelolaan urusan pemerintah bidang informasi dan komunikasi, statistik dan persandian pemerintah kota;
- e. Pengelolaan domain-domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkungan kota;
- f. Pengelolaan e-government di lingkungan Kota Pematang Siantar;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini :



**Gambar 1.1**  
**Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika**



Sumber : Perwa No 27 Tahun 2022

Tujuan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023 dimaksud sebagai pedoman/acuan bagi bidang-bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, pelaksanaan kebijakan, mengelola kinerja mulai dari perencanaan strategis, perencanaan kinerja, perjanjian kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja.

Laporan Kinerja ini merupakan media pertanggungjawaban Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar, guna mengukur tingkat keberhasilan atas visi dan misi yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis. Evaluasi terhadap pencapaian kinerja ditujukan untuk:

1. Mempertanggungjawabkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar kepada Walikota Pematangsiantar dan pihak berkepentingan (stakeholder), dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (good governance) yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas.

2. Meningkatkan akuntabilitas Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar.
3. Sebagai umpan balik bagi peningkatan kinerja dan kredibilitas Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar terhadap pemberi delegasi wewenang.
4. Untuk mengetahui Tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas sehingga akan lebih efektif, efisien dan responsif terhadap lingkungan.
5. Untuk dapat mengetahui perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan berikut hasil pengolahan dan evaluasi sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya.

### 1.3. Data Umum Organisasi

#### 1.3.1. Personil

Jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar sebanyak 28 orang PNS dan 16 orang Tenaga Harian Lepas (THL), total Pegawai 44 orang dengan rincian sesuai sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar Berdasarkan Pangkat, Golongan Pendidikan, Gender**

NO	URAIAN	JUMLAH (ORANG)	KETERANGAN
1	Jumlah Pegawai dirinci menurut Golongan a. Golongan IV b. Golongan III c. Golongan II d. Golongan I	6 16 6 0	
2	Jumlah Pegawai menurut Kualifikasi Pendidikan : a. S2, S3 b. S1 c. D3 d. SMU e. SLTP f. SD	7 14 2 5 - -	
3	Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan Struktural : a. Eselon II b. Eselon III c. Eselon IV	1 4 2	
4	Jumlah Pegawai yang menduduki jabatan Fungsional : a. Jabatan Fungsional Pranata Humas b. Jabatan Fungsional Statisi c. Jabatan Fungsional Manggala d. Jabatan Fungsional Pranata Komputer	1 1 1 4	

NO	URAIAN	JUMLAH (ORANG)	KETERANGAN
5	Jumlah Pegawai Berdasarkan Gender a. Laki-laki b. Perempuan	17 11	
6	Jumlah PNS Keseluruhan	28	
7	Jumlah Tenaga Harian Lepas	16	
	Jumlah Total	44	

Sumber Data : DUK Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar 2023.

### 1.3.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana adalah merupakan alat pendukung yang sangat vital dalam melaksanakan tugas pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar, adapun Sarana dan Prasarana yang kami sampaikan pada laporan ini sebagaimana Tabel Data Sarana dan Prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar Tahun 2023 di bawah ini :

**Tabel 1.2**  
**Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika**  
**Kota Pematangsiantar Tahun 2023**

NO	JENIS SARANA PRASARANA	BARANG (UNIT)		
		BAIK	RUSAK ATAU TIDAK DIPAKAI	JUMLAH
1	2	3	4	5=(3+4)
1	Tanah bangunan Kantor Pemerintah	1		1
2	Elektrik Genereting set lainnya	1		1
3	Pompa Air	1		1
4	Kendaraan dinas Roda 4	2		2
5	Sepeda Motor	7		7
6	Global Positioning system	1		1
7	Alat ukur jarak dan ketinggian	1		1
8	Alat ukur grounding	1		1
9	Filing kabinet besi	9		9
10	Brankas		1	1
11	CCTV Camera Control Television system	37		37
12	Papan visual	6		6
13	Penghancur kertas	3		3
14	Mesin absensi	1		1

NO	JENIS SARANA PRASARANA	BARANG (UNIT)		
		BAIK	RUSAK ATAU TIDAK DIPAKAI	JUMLAH
1	2	3	4	5=(3+4)
15	Overhead Projctor	3		3
16	Papan nama Instansi	1		1
17	Papan pengumuman	1		1
18	Mesin Faximile	1		1
19	Meja rapat	3		3
20	Kursi Rapat	77		77
21	Kursi Tamu	1		1
22	Kursi putar	21		21
23	Bangku Tunggu	2		2
24	Kursi Lipat	44		44
25	Sofa	1		1
26	Meja televisi	1		1
27	AC Window	1		1
28	AC Split	19		19
29	Kipas angin	2		2
30	Televisi	7		7
31	Loudspeaker	2		2
32	Soundssystem	2		2
33	Wireless	3		3
34	Rak besi	3		3
35	Display	1		1
36	Meja resepsionis	1		1
37	Exhause fan	1		1
38	Termos air	2		2
39	Microphone	2		2
40	Microphone table standing	1		1
41	UPS	1		1
42	Camera Video	2		2
43	Dispenser	2		2
44	Karpet	29		29
45	Bracket standing peralatan	2		2

NO	JENIS SARANA PRASARANA	BARANG (UNIT)		
		BAIK	RUSAK ATAU TIDAK DIPAKAI	JUMLAH
1	2	3	4	5=(3+4)
46	Alat rumah tangga	3		3
47	Alat pemadam/portable	12		12
48	Meja kerja Pejabat Eselon II	1		1
49	Meja kerja pejabat eselon III	5		5
50	Meja kerja pejabat eselon IV	15		15
51	Kursi pejabat eselon II	1		1
52	Kursi pejabat eselon III	5		5
53	Kursi Pejabat Eselon IV	15		15
54	Lemari buku arsip untuk arsip dinamis	6		6
55	Bufet kaca	5		5
56	Wireles mic	1		1
57	UPS	2		2
58	Batery charger	1		1
59	Peralatan audio studio lainnya	6		6
60	Camera elektronik	1		1
61	Video monitor	12		12
62	Video processor	2		2
63	Remote control unit	2		2
64	Lensa kamera	1		1
65	Camera digital	4		4
66	Lampu blitz kamera	1		1
67	Video Confrance	1		1
68	Alat studio lainnya	4		4
69	Handy Talky	12		12
70	Faxmile	1		1
71	Alat komunikasi lainnya	1		1
72	Unit tranciver	1		1
73	Wireles amplifier	1		1
74	Microwave FPU portabel	2		2
75	Concrete Tower	1		1
76	Tripod	3		3

NO	JENIS SARANA PRASARANA	BARANG (UNIT)		
		BAIK	RUSAK ATAU TIDAK DIPAKAI	JUMLAH
1	2	3	4	5=(3+4)
77	Stabilizer	1		1
78	Ketel pemasakan	2		2
79	Alat degreening	4		4
80	Wireles data Transmision system	1		1
81	PC Unit	21	1	22
82	Laptop	26		26
83	Tablet PC	1		1
84	Printer	34		34
85	Scaner	1		1
86	Hardisk external	9		9
87	Server	4		4
88	Router	3		3
89	Hub	1		1
90	Rak server	1		1
91	Wireles acces point	27		27
92	Switch	1		1
93	Peralatan jaringan lainnya	4		4
94	Bangunan gedung kantor permanen	1		1
95	Bangunan gedung tempat kerja lainnya	1		1
96	Bangunan menara telekomunikasi	8		8
97	Instalasi komunikasi elektronik	2		2
98	Jaringan telepon diatas tanah	2		2

Data : Kartu Inventaris Barang (KIB) Diskominfo Tahun 2023

### 1.3.1. Pembiayaan

Untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran tahun 2023 dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan informatika Kota Pematangsiantar, mempunyai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2023 yang secara rinci dapat disajikan sebagaimana dalam Tabel Daftar Anggaran Belanja terlampir :

**Tabel 1.3**  
**Daftar Anggaran Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika**  
**Kota Pematangsiantar, Tahun 2023**

NO	Program dan Kegiatan	Pembiayaan	%
1	2	3	4
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KOTA</b>	<b>4.249.834.979</b>	<b>35,16 %</b>
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.239.141.524	18,52 %
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	954.314.335	7,89 %
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	584.494.468	4,83 %
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	266.624.652	2,20 %
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	205.260.000	1,69 %
2	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>3.285.058.166</b>	<b>27,18 %</b>
	Pengelolaan Informasi dan komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.285.058.166	27,18 %
3	<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>4.408.694.420</b>	<b>36,47 %</b>
	Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.408.694.420	36,47 %
4	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>142.376.990</b>	<b>1,17 %</b>
	Penyelenggaraan statistic sektoral di lingkup daerah kabupaten kota	142.376.990	

Sumber data : DPPA Diskominfo Tahun 2023

#### 1.4. Isu Startegis

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Suatu Kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam menentukan data atau informasi yang akan dijadikan isu strategis dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:

- ✓ Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional.
- ✓ Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah daerah
- ✓ Luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap publik.
- ✓ Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah.
- ✓ Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola
- ✓ Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

Sedangkan permasalahan pembangunan yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar saat ini kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun kedepan perlu mendapat perhatian dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah lima tahunan. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Berikut Identifikasi permasalahan pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar sebagai berikut:

1. Kegiatan, Program Kerja dan Proses Pembangunan, Pemerintahan dan kemasyarakatan masih belum terinformasikan dengan optimal kepada masyarakat.
2. Kurangnya SDM ASN yang memiliki Kompetensi dibidang TIK dibawah pengeloaaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematang Siantar.
3. Belum tersedianya sarana dan prasarana untuk mengelola informasi, persandian serta mendukung SPBE
4. Belum optimalnya kinerja PPID dalam penyajian data dan informasi public di setiap OPD.
5. Infrastruktur jaringan TIK belum terkoneksi sampai puskesmas.
6. Masih belum dilaksanakannya audit TIK (infrastruktur, sarana prasarana, aplikasi dan keamanan) yang dilakukan oleh Tim Audit (inspektorat atau auditor).
7. Belum terselenggaranya Online single submission (OSS)
8. Belum diterapkannya manajemen SPBE (manajemen data, manajemen resiko, manajemen layanan SPBE, manajemen Pengetahuan, manajemen perubahan).
9. Masih kurangnya regulasi/ kebijakan tentang keamanan informasi.
10. Belum diterapkannya sistem manajemen keamanan informasi di pemerintahan Kota.
11. Tugas dan Fungsi persandian belum ada yang menggantikan ASN yang telah purna bhakti.
12. Belum Optimalnya Informasi Statistik Sektoral yang dapat diakses oleh masyarakat maupun OPD (satu data).
13. Masih kurangnya kesadaran OPD dalam menyediakan informasi publik dalam rangka keterbukaan informasi publik.
14. Tidak memiliki control atau pengawasan atas informasi yang berkembang dimasyarakat.



#### 1.4.1 LANDASAN HUKUM

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pematangsiantar Tahun 2012–2032;
9. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar;

10. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2023.
12. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar.
13. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 29 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
14. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2023.

#### **1.4.2 SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Meliputi Latar Belakang, Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi Perangkat Daerah, Landasan Hukum dan Sistematika Penyajian.

##### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan kinerja yang meliputi perencanaan strategis dan penetapan kinerja.

##### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Dalam bab ini menggambarkan akuntabilitas kinerja yang terdiri atas capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran yang mendukung terwujudnya pencapaian kinerja.

##### **BAB IV PENUTUP**

Dalam bab ini diuraikan keberhasilan dan kegagalan, kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja serta langkah antisipatif dan strategi pemecahan masalah.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 RENCANA STRATEGIS

Visi Pemerintah Kota Pematangsiantar Visi Kota Pematangsiantar tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pematangsiantar Tahun 2022-2027 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 7 Tahun 2022 adalah

**" Terwujudnya Kota Pematang Siantar Sehat, Sejahtera dan Berkualitas"**

Indikasi terwujudnya pencapaian tersebut dimaknai, dengan:

- 1. Sehat** : Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara jasmani dan rohani melalui ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan harmonisasi kehidupan masyarakat, serta penyediaan infrastruktur dan tenaga kesehatan mulai dari level bawah serta melakukan gerakan masyarakat sehat dengan upaya- upaya preventif dan kuratif sejak dini guna menjamin kehidupan yang nyaman dan berkelanjutan, khususnya masa dan atau pasca pandemic Covid – 19.
- 2. Sejahtera** : Meningkatkan perlindungan masyarakat dan sosial ekonomi masyarakat melalui penyediaan infrastruktur, penguatan dunia usaha, kegiatan ekonomi masyarakat dan peluang usaha yang kondusif untuk meningkatkan kesempatan kerja dengan membuka akses investasi serta meningkatkan inovasi usaha jasa, dagang dan industri, khususnya masa dan atau pasca pandemi Covid 19.
- 3. Berkualitas** : Meningkatkan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang maju dan unggul serta berdaya saing melalui peningkatan SDM dan pengelolaan sumber daya alam yang ada, melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa responsive serta konsisten dalam melayani, implementasi regulasi dan kebijakan pembangunan menurut skala prioritas, sebagai kota transit, serta mewujudkan daya tarik sebagai Sub Pusat Perdagangan Regional Sumatera Utara bagi *hinterland*.

Upaya perwujudan Visi tersebut di atas diharapkan dapat dicapai melalui 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. Memperkuat kehidupan masyarakat yang sehat, sejahtera, humanis, agamis dan beradab dengan menghargai local wisdom dan heterogenitas yang berkualitas. Bertujuan meningkatkan kesehatan, sehat jasmani dan rohani, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata serta membentuk masyarakat yang kondusif, berbudaya dan menjamin masyarakat mendapat pelayanan dasar sesuai dengan standar regional, perekonomian.
2. Memperkuat dan memulihkan penyehatan iklim usaha perdagangan dan jasa, UMKM dan koperasi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan yang terdampak masa pandemi atau paska pandemi Covid 19. Bertujuan menjawab permasalahan di bidang ekonomi, khususnya mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat yang merata untuk bangkit pada masa dan pasca pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi yang memperhatikan lapangan usaha utama dan pendukung lainnya sebagai penopang perekonomian dan kesejahteraan Masyarakat.
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsif melayani berdasarkan prinsip *good governance dan corporate governance*. Bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat dengan penerapan birokrasi yang cepat, tepat baik secara digital dan langsung dengan pelayanan yang professional .
4. Meningkatkan sentralitas dan daya tarik kota, guna pencapaian Siantar sebagai sub pusat perdagangan dan jasa regional di Provinsi Sumatera Utara. Bertujuan untuk mewujudkan cita cita Kota Pematang Siantar sebagai sub pusat perdagangan dan jasa di Provinsi Sumatera Utara dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah.
5. Mewujudkan Kota berkualitas melalui penataan ruang, kebersihan dan infrastruktur, keindahan pengembangan lingkungan kota secara berkelanjutan. Bertujuan untuk membangun infrastruktur kota yang berkualitas dengan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan pola dan struktur ruang yang berwawasan lingkungan berkelanjutan.

Berdasarkan urusan kewenangan yang dimiliki, Dinas Komunikasi dan Informatika berkontribusi sebagai pendukung, penunjang dan pengarah terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana tercantum

dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar, DISKOMINFO Kota Pematangsiantar untuk tahun 2022-2027 mendukung visi dan misi Wali Kota Pematangsiantar, terutama pada misi ke 3 (tiga) yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsif melayani berdasarkan prinsip *good governance* dan *good corporate governance*. Pada misi ini terdapat satu tujuan, yaitu mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan. Untuk tujuan ini ada 3 sasaran yang ingin dicapai yaitu : 1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik, dengan indikator kinerja : a. Indeks Kepuasan Masyarakat, b. Indeks SPBE; 2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja, dengan indikator kinerja : a. Nilai SAKIP, b. Indeks IPKD; 3. Meningkatnya kemampuan keuangan daerah dengan indikator kinerja : Derajat Desentralisasi Fiskal.

Dari ketiga sasaran RPJMD Kota Pematangsiantar diatas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar mendukung sasaran Pertama , meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Nilai Indeks SPBE yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN RB setiap tahunnya.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar sebagai bagian integral dari Pemerintah Kota Pematangsiantar, memiliki peran dan prosisi strategis dalam kerangka pencapaian visi pembangunan jangka menengah Kota Pematangsiantar yaitu : "Mewujudkan Kota Pematangsiantar yang Sehat, Sejahtera dan Berkualitas" sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pematangsiantar tahun 2022-2027.

Untuk menjadikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar yang visioner tentu banyak aspek yang harus menjadi perhatian, karena hal ini berkaitan dengan keberadaanya sebagai Lembaga teknis bergerak di bidang komunikasi dan Informatika, bidang statistic dan persandian dan menjadi lokomotif proses integrasi sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kota Pematangsiantar. Hal-hal yang menjadi perhatian, harapan, keadaan atau kondisi serta lingkungan strategis yang terjadi saat ini serta yang diinginkan pada masa yang akan datang adalah :

- Kominfo sebagai institusi yang menjalankan tugas pokok dan fungsinya telah menyediakan akses penyampai informasi (website) diseluruh OPD.
- Adanya komitmen dari Pemerintah Daerah dalam penyediaan akses internet untuk seluruh OPD.

- Hampir seluruh kalangan masyarakat sudah memiliki smartphone.
- Telah disebarkannya informasi publik terkait kebijakan dan program Pemerintah daerah melalui website, media cetak, media online, media elektronik dan media social.

Keberadaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar sebagai institusi, berfungsi sebagai pendukung dan penunjang dari pencapaian visi misi kota, sehingga dalam perumusan tujuan dan sasarannya harus mencerminkan upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota, maka tujuan dan sasaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar dalam jangka menengah diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar Tahun 2022-2027 (sesuai Renstra)**

RPJMD	RENSTRA			
	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran
Ke 3 : Meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsif melayani berdasarkan prinsip <i>Good Governance</i> dan <i>Cooperate Governanace</i> .	mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan	Indeks SPBE	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase penanganan aduan dan keluhan melalui aplikasi SP4N lapor
				Nilai Indeks SPBE
				Nilai Indeks KAMI
				Indeks Keterbukaan Informasi Publik
				Persentase OPD yang menggunakan statistic sektoral dalam menyuusn dan mengevaluasi Pembangunan Daerah
Indeks Kepuasan Masyarakat				

Sumber : Renstra Diskominfo Kota Pematangsiantar 2022-2027

**Tabel 2.2**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target**  
**Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar**  
**Tahun 2022-2027 (Sesuai Renstra)**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi Awal RENSTRA (2022)						Kondisi Akhir RENSTRA (2027)
					2023	2024	2025	2026	2027	
1	Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Indeks SPBE		2,85	2,99	3,18	3,40	3,56	3,56
			Indeks SPBE		2,85	2,99	3,18	3,40	3,56	3,56
			Persentase Penanganan aduan Keluhan/aduan aplikasi SP4N Lapor		70 %	70%	75%	75%	80%	80%
			Jumlah metadeta yang disajikan dalam buku statistic sektoral		10 Metadeta	12 Metadeta	14 Metadeta	16 Metadeta	18 Metadeta	18 Metadeta
			Persentase OPD yang menggunakan internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar		100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Jumlah Konten/Informasi tentang kebijakan pemerintah Kota pematangsiantar yang dapat diakses publik		550 Konten	600 Konten	650 Konten	700 Konten	750 Konten	750 Konten
			Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah		Skor 133	Skor 208	Skor 270	Skor 408	Skor 505	Skor 505
			Persentase Layanan Publik terintegrasi pada website		80 %	85 %	90 %	95 %	100%	100%
			Indeks Kepuasan Masyarakat	80	80	80	85	85	85	85

Sumber : Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar 2022-2027

## 2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar dalam menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar tahun 2022-2027.

Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD Kota Pematangsiantar Tahun 2022-2027 dan Dokumen Renstra DISKOMINFO Kota Pematangsiantar Tahun 2022-2027.

Dibawah ini disajikan Tabel Indikator Kinerja Utama DISKOMINFO Kota Pematangsiantar sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar Nomor 900.2.2.3/114/Kominfo/2023 tentang Indikator Kinerja Utama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar.

**Tabel 2.3**  
**Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar**

No	Sasaran	Indikator	Target 2023
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase penanganan aduan dan keluhan melalui aplikasi SP4N lapor	70 %
		Nilai Indeks SPBE	2,85
		Nilai Indeks KAMI	133
		Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Menuju Informatif
		Indeks Kepuasan Masyarakat	80
		Persentase OPD yang menggunakan statistik sektoral dalam menyusun dan mengevaluasi Pembangunan Daerah	100 %

Sumber : Keputusan Kepala Diskominfo Nomor 900.2.2.3/114/Kominfo/1/2023



## 2.3 RENCANA KINERJA TAHUN 2023

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar memiliki 3 urusan antara lain Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Bidang Statistik dan Urusan Bidang Persandian, Dinas Komunikasi dan Informatika juga menjadi pengampu salah satu prioritas Pembangunan Daerah Kota Pematangsiantar Yaitu Program Aplikasi Informatika sebagai hasil rumusan Pencapaian Visi dan Misi dengan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dimana untuk mencapai Misi 3 yaitu : Meningkatkan Tata Kelola yang efektif, efisien, bersih, responsive melayani berdasarkan good governance dan cooperative governance. Dimana Tujuan 3.1 adalah : Mewujudkan reformasi tata kelola Pemerintahan dan menjadi Sasaran 3.1.1 adalah : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan Indikator Sasaran yaitu Indeks SPBE dimana yang menjadi akar masalah untuk mencapai misi tersebut adalah Pemerintahan yang berbasis elektronik belum berjalan sepenuhnya.

Pada dasarnya program dan kegiatan merupakan upaya guna mengimplementasikan strategi dan kebijakan OPD dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah direncanakan, dengan kata lain bahwa program merupakan instrument dari suatu kebijakan yang berisi atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OPD tersebut atau merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program.

Program dan kegiatan haruslah memiliki alat ukur yang jelas dan dibuat guna menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pada suatu program dan kegiatan yang disebut dengan indikator kinerja. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan dari suatu program dan kegiatan baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai bentuk pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat pemantauan evaluasi. Adapun Program dan kegiatan yang akan direncanakan berdasarkan sasaran pembangunan pada Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

**Tabel.2.4**  
**Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika**

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (RP)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
1	Administrasi Keuangan	3.411.223.652
A	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.411.223.652
2	Administrasi Umum Perangkat daerah	
A	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9.986.156

B	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	29.987.232
C	Penyediaan peralatan rumah tangga	14.998.200
D	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	99.511.000
E	Penyediaan bahan logistic kantor	49.990.000
F	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20.095.295
G	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	157.536.000
H	Pentausahaan arsip dinamis	55.434.356
3	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	
A	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	599.244.717
4	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	
A	Penyediaan jasa surat menyurat	4.999.600
B	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	84.116.496
C	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	368.189.370
5	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	
A	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan Dinas	92.840.000
B	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	44.018.000
C	Pemeliharaan asset tetap lainnya	600.000.000
II	Program Informasi dan Komunikasi Publik	
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten kota	
A	Monitoring opini dan aspirasi publik	313.822.722
B	Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	369.600.000
C	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	115.075.623
D	Pelayanan Informasi Publik	244.771.393
III	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
1	Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota	
A	Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan pengolahan analisa dan desiminasi data statistic sektoral	150.000.000
IV	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	
1	Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota	
A	Pengelolaan pusat data Pemerintah daerah	2.606.181.600
B	Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik	1.528.126.000
C	Monitoring evaluasi dan pelaporan pengembangan ekosistem SPBE	265.175.533
D	Koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik	77.888.000
E	Koordinasi dan sinkronisasi sistem keamanan informasi	49.999.900

V	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	
1	Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	
A	Penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten kota	56.008.620
Total		11.418.819.465.-

Sumber : Renja Diskominfo Tahun 2023

## 2.4. PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar pada tahun 2023 telah melakukan perubahan Perjanjian Kinerja sesuai dengan Visi-Misi yang tercantum didalam RPJMD Kota pematangsiantar Tahun 2022-2027.

Dibawah ini di sajikan tabel Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Komunikasi dan Infoematika Kota pematangsiantar.

**Tabel 2.5**  
**Perjanjian Kinerja Eselon II 2023**  
**Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Penanganan Aduan Sp4N Lapor	70 %
		Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Menuju Informatif
		Indeks kepuasan Masyarakat	80 %
		Indeks SPBE	2,85
		Persentase OPD yang menggunakan statistic sektoral dalam menyusun dan mengevaluasi perencanaan pembangunan Kota Pematang Siantar	100 % (5 OPD)
		Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah (Indeks KAMI)	100% (skor 133)

Sumber Data : Perjanjian Kinerja DISKOMINFO Kota Pematangsiantar Tahun 2023

**Tabel 2.6**  
**Perjanjian Kinerja Eselon III Tahun 2023**  
**Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Manajemen dan administrasi yang sesuai dengan SOP dan tata naskah dinas	12 Bulan
		Manajemen administrasi kepegawaian sesuai dengan SOP dan tepat waktu	12 Bulan
		Ketersediaan sarana dan prasarana terhadap kebutuhan	100 %
		Pengelolaan dan pemeliharaan barang milik daerah yang akurat	12 bulan

	dan tepat waktu	
	Penataan arsip aktif dan in aktif sesuai dengan peraturan yang berlaku	8 Berkas

Sumber Data : Perjanjian Kinerja Sekretaris DISKOMINFO Kota Pematangsiantar Tahun 2023

**Tabel 2.7**  
**Perjanjian Kinerja Eselon III Tahun 2023**  
**Kepala Bidang Penyelenggaraan E-government Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Indeks SPBE	Jumlah layanan publik yang terintegrasi pada portal website Pemerintah Kota	34 Website
		Penilaian mandiri sistem pemerintahan berbasis elektronik Kota Pematangsiantar	47 Indikator
		JUmlah OPD yang menggunakan internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	34 OPD

Sumber Data : Perjanjian Kinerja Kepala Bidang DISKOMINFO Kota Pematangsiantar Tahun 2023

**Tabel 2.8**  
**Perjanjian Kinerja Eselon III Tahun 2023**  
**Kepala Bidang Layanan Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Persentase penanganan aduan Sp4N lapor	70 %
		Jumlah metada yang disajikan dalam bentuk buku sttsitik sektoral	10 Metadata

Sumber Data : Perjanjian Kinerja Kepala Bidang DISKOMINFO Kota Pematangsiantar Tahun 2023

**Tabel 2.9**  
**Perjanjian Kinerja Eselon III Tahun 2023**  
**Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Terlaskananya penyebaran informasi publik melalui konten konten di website, media social dan media cetak ke masyarakat	4000 konten
		Terselenggaranya pengelolaan media publik	2301 kali

		Terlaksananya kegiatan pelayanan informasi publik Belanja hibah kepada lembaga organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum	4 Organisasi
--	--	--	--------------

Sumber Data : Perjanjian Kinerja Kepala Bidang DISKOMINFO Kota Pematangsiantar Tahun 2023

**Tabel 2.10**  
**Perjanjian Kinerja Eselon IV Tahun 2023**  
**Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Nilai AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar	Manajemen dan administrasi yang sesuai dengan SOP dan tata naskah dinas	12 Bulan
		Manajemen administrasi kepegawaian sesuai dengan SOP dan tepat waktu	12 Bulan
		Ketersediaan sarana dan prasarana terhadap kebutuhan	100 %
		Pengelolaan dan pemeliharaan barang milik daerah yang akurat dan tepat waktu	12 bulan
		Penataan arsip aktif dan in aktif sesuai dengan peraturan yang berlaku	8 Berkas

Sumber Data : Perjanjian Kinerja Es IV DISKOMINFO Kota Pematangsiantar Tahun 2023

**Tabel 2.11**  
**Perjanjian Kinerja Eselon IV Tahun 2023**  
**Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Nilai AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar	Jumlah laporan Renstra dan Renja	2 Laporan
		Jumlah Laporan perubahan Renja	1 laporan
		Jumlah Laporan IKU	1 Laporan
		Jumlah Laporan LKPJ	1 Laporan
		Jumlah Laporan LPPD	1 Laporan
		Jumlah Laporan LAKIP	1 Laporan

	Jumlah laporan keuangan	1 laporan
	Jumlah laporan penyusunan PK	1 Laporan
	Jumlah Laporan terkait SAKIP	100 %
	Jumlah penyusunan laporan Rencana Aksi	1 laporan
	Jumlah laporan Evalausi Renja	4 laporan
	Jumlah Laporan terkait Laporan Semester	2 Laporan
	Laporan penyusunan SHS	1 Laporan
	Jumlah Dokumen terkait Laporan RKPD dan SIPD	2 Dokumen

Sumber Data : Perjanjian Kinerja Es IV DISKOMINFO Kota Pematangsiantar Tahun 2023

### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak- pihak yang erwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Pengukuran kinerja telah dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar dengan berpedoman pada Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar Tahun 2023. Penilaian ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Wali Kota Pematangsiantar yang menjadi tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar. Capaian kinerja sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar Tahun 2023 diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis Dinas Komunikasi dan informatika Kota Pematangsiantar Tahun 2023. Penilaian dilakukan dengan memberikan peringkat capaian kinerja sesuai dengan kategori kinerja, yaitu :

**Tabel 3.1**  
**Skaia Nilai Peringkat Kinerja**

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi
76 % ≤ 90 %	Tinggi
66 % ≤ 75 %	Sedang
51 % ≤ 65 %	Rendah
≤ 50 %	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri No. 86 Tahun 2017

Indikator kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar beserta target capaian realisasinya. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerjanya dengan rincian sebagai berikut:



### 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

#### 3.1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama. Untuk itu yang utama yang perlu dilakukan adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar telah menetapkan Indikator Kinerja Utama melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar Nomor : Keputusan Kepala Diskominfo Nomor 900.2.2.3/114/Kominfo/1/2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar.

**Tabel 3.2**  
**Pengukuran Kinerja Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar Tahun 2023**

No	Sasaran	Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase penanganan aduan dan keluhan melalui aplikasi SP4N lapor	70 %	98,8 %	141,1 %
		Nilai Indeks SPBE	2,85	2,84	99,64 %
		Nilai Indeks KAMI	133	138	103,7 %
		Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Menuju Informatif	Menuju Informatif	100 %
		Indeks Kepuasan Masyarakat	80	80	100 %
		Persentase OPD yang menggunakan statistic sektoral dalam menyusun dan mengevaluasi Pembangunan Daerah	100 % (5 OPD)	100% (5 OPD)	100 %

Berdasarkan Tabel 3.2 terdapat 1 sasaran yang telah ditetapkan dengan 6 indikator kinerja sasaran yang merupakan indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar pada tahun 2023, dari 6 indikator tersebut terdapat 2 indikator melebihi target dan 3 indikator sesuai target dan 1 indikator tidak mencapai target yaitu kurang 0,36 % dari target yang telah ditetapkan.

Kurangnya target realisasi terhadap 1 indikator yaitu 99,64 % dengan indikator Indeks SPBE disebabkan oleh belum adanya TIM audit TIK pada Pemerintah Kota Pematangsiantar yang menjadi Domain 3 Penilaian SPBE yaitu Manajemen SPBE

### 3.1.2 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tujuan dan Sasaran Tahun ini

Capaian kinerja indikator tujuan diperoleh berdasarkan indikator kinerja tujuan. Perumusan indikator tujuan lebih difokuskan pada indikator kinerja strategis. Secara rincian capaian masing-masing indikator kinerja tujuan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.3**  
**Realisasi Indikator Kinerja Tujuan Tahun 2023**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	% CAPAIAN
1	Nilai Indeks SPBE	2,85	2,84	99,64 %

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa dari 1 indikator tujuan yang telah ditetapkan, dan memperoleh realisasi yang tidak memenuhi target. Pencapaian indikator tujuan yang tidak memenuhi target ini dipengaruhi beberapa faktor yang akan dijelaskan pada sub bab 3.1.5

Selanjutnya berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar telah menetapkan 1 (satu) target kinerja yang akan dicapai di Tahun 2023, untuk selanjutnya akan dilakukan pengukurannya dengan menggunakan Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2023 agar diketahui hasilnya setelah Tahun Anggaran 2023 berakhir. Adapun perbandingan antara target dan realisasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.4**  
**Pengukuran Kinerja Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar Tahun 2023**

No	Sasaran	Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase penanganan aduan dan keluhan melalui aplikasi SP4N lapor	70 %	98,8 %	141,1 %
		Nilai Indeks SPBE	2,85	2,84	99,64 %
		Nilai Indeks KAMI	133	138	103,7 %
		Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Menuju Informatif	Menuju Informatif	100 %
		Indeks Kepuasan Masyarakat	80	80	100 %
		Persentase OPD yang	100 %	100%	100 %

No	Sasaran	Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %
		menggunakan statistic sektoral dalam menyusun dan mengevaluasi Pembangunan Daerah	(5 OPD)	(5 OPD)	

Berdasarkan Tabel diatas terdapat 1 sasaran yang telah ditetapkan dengan 6 indikator kinerja sasaran yang merupakan indicator Kinerja Utama (IKU) dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar pada tahun 2023, dari 6 indikator tersebut terdapat 2 indikator melebihi target dan 3 indikator sesuai target dan 1 indikator tidak mencapai target yaitu kurang 0,36 % dari target yang telah ditetapkan. Kurangnya target realisasi terhadap 1 indikator yaitu 99,64 % dengan indikator Indeks SPBE disebabkan oleh belum adanya TIM audit TIK pada Pemerintah Kota Pematangsiantar yang menjadi Domain 3 Penilaian SPBE yaitu Manajemen SPBE.

Selanjutnya realisasi Kinerja sesuai dengan Program dan Kegiatan untuk Sekretariat dan Bidang Tahun 2023 dapat disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.5**  
**Realisasi Kinerja sesuai dengan Program dan Kegiatan untuk Sekretariat dan Bidang Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Program/Kegiatan
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Sekretariat</b>				
	Meningkatkan Kualitas pelayanan Publik	Nilai AKIP OPD	CC	C	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KOTA
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
<b>2</b>	<b>Bidang Penyelenggaraan E-Government</b>				
		Persentase Layanan Publik yang terintegrasi pada portal website Pemerintah Kota pematangsiantar	100 % (34 Website)	100 %	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Program/Kegiatan
1	2	3	4	5	6
					Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
					Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah
					Koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik
					Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik
					Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pengembangan Ekosistem SPBE
<b>3</b>	<b>Bidang Pengelolaan Informasi dan komunikasi Publik</b>				
	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Jumlah Konten/Informasi terkait program dan kebijakan Pemerintah kota pematangsiantar (Penyebaran informasi publik melalui website, media cetak, media online, media elektronik, dan media social)	4000 Konten	8833 Konten	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>
					Pengelolaan Informasi dan Komunikasi publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
					Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik
					Pengelolaan media komunikasi publik
					Pelayanan Informasi Publik
<b>3</b>	<b>Bidang Layanan Komunikasi</b>				
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah metadata yang disajikan dalam buku statistik sektoral	10 metada	10 Metadata	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATSITIK SEKTORAL</b>
					Penyelenggaraan Statsitik sektoral dilingkup daerah kabupaten kota
					Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan pengolahan analisis dan desiminasi data statistik sektoral

Sumber Data : Evaluasi Renja Diskominfo

### 3.1.3 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu dan beberapa Tahun Terakhir

Dikarenakan adanya Perubahan Perjanjian Kinerja pada tahun 2023, sehingga mengakibatkan perubahan sasaran dan indikator kinerja, maka dibawah ini disajikan perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan 2021 dengan dengan dua kriteria yaitu untuk indikator yang sama dibuat dalam baris tabel yang sama dan untuk indikator yang berbeda dibuat dalam baris table yang berbeda.

**Tabel 3.6**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar Tahun 2022-2023**

NO	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
1	2	3	4	5
1.	Indeks SPBE	2,85	2,84	2,3
2.	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Menuju Informatif	Menuju Informatif	-
3.	Indeks Kepuasan masyarakat	80	80	-
5.	Persentase Penanganan Aduan SP4N Laporan	70 %	98,8	95,3
6.	Persentase OPD yang menggunakan statistik dalam menyusun dan mengevaluasi perencanaan pembangunan Kota Pematangsiantar	100 %	100%	-
7.	Tingkat Keamanan Informasi	100 % (skor 133)	138	-

Sumber Data : Evaluasi Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar Tahun 2023.

Berdasarkan tabel diatas tidak bisa membandingkan antara capaian kinerja Tahun 2023 dengan beberapa tahun terakhir atau tahun 2022 karena adanya perubahan sasaran dan indikator sasaran sejak Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023. Sasaran dan indikator yang konsisten hanya hanya 1 yakni Indeks SPBE, itupun hanya di Tahun 2022 dan Tahun 2023. Dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja indikator tersebut pada tahun 2023 meningkat sangat signifikan apabila dibandingkan dengan capaian Tahun 2022.

Pada tahun 2023 terhadap indikator sasaran ditambah beberapa indikator antara lain Keterbukaan Informasi Publik, Persentase OPD yang menggunakan statistik sektoral dalam menyusun dan mengevaluasi Pembangunan Daerah, dan Indeks Kami tidak dapat dibandingkan dengan tahun lalu disebabkan adanya perubahan sasaran dan indikator sasaran.

### 3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis.

Realisasi kinerja Tahun 2023 adalah pelaksanaan kinerja tahun pertama dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar Tahun 2022-2027.

Realisasi kinerja Dinas Komunikasi dan informatika Kota Pematangsiantar Tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.7**

**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	TARGET	TARGET	TARGET
		2023	2023	2024	2025	2026
1	Indeks SPBE	2,85	2,84	2,99	3,18	3,40

Berdasarkan tabel diatas jika dilihat dari target dan realisasi Tahun 2023, maka untuk indikator kinerja Indeks SPBE, karena untuk tahun awal sendiri capaiannya kurang 0,1 point . Sedangkan untuk tahun 2026 sudah cukup realistis bisa dicapai apabila secara konsisten pencapaian meningkat dari tahun ke tahun.

### 3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan Kinerja serta Alternative Solusi yang telah dilakukan.

Pada tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar telah berhasil mencapai target kinerja secara keseluruhan sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan maupun perjanjian kinerja. Beberapa faktor penyebab keberhasilan dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Meningkatnya komitmen pimpinan dan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya meningkatkan Indeks SPBE di Kota Pematangsiantar.

Hal tersebut didukung dengan ketersediaan dana yang memadai untuk membiayai semua program/kegiatan/sub kegiatan yang telah direncanakan sangat dibutuhkan, karena tidak mungkin kegiatan bisa terlaksana apabila tidak ada anggarannya. Walaupun anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar tidak terlalu besar tetapi berkat perencanaan yang baik, semuanya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan prioritas pada Tahun 2023. Hal tersebut didukung oleh beberapa faktor diantaranya :

- Ketepatan dalam perencanaan program dan kegiatan;
- Kesesuaian pengalokasian anggaran dengan rencana pelaksanaan program dan kegiatan.

2. Sarana dan Prasarana yang memadai

Tersedia sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan kebutuhan pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika, dan ini akan terus ditingkatkan sesuai dengan perkembangan zaman.

Langkah-langkah mitigasi yang dilakukan ke depan dalam rangka pencapaian kinerja secara optimal antara lain:

- a. Melakukan evaluasi berkala setiap triwulan terhadap kegiatan-kegiatan yang rendah dalam pencapaian target baik fisik maupun keuangan.
- b. Koordinasi dan komunikasi baik diinternal maupun antar Kementerian/Lembaga/Pemerintah Provinsi dan Organisasi Perangkat Daerah lain dalam mewujudkan keselarasan, sinkronisasi, dan sinergi pencapaian indikator Indeks SPBE.
- c. Memberi penghargaan bagi kegiatan dengan pencapaian terbaik dan peringatan /teguran bagi kegiatan dengan pencapaian rendah sebagai upaya mendorong kinerja unit kerja dalam pelaksanaan kegiatan.
- d. Menambah sarana dan prasarana kerja untuk mendukung inovasi dan kreativitas SDM.

### 3.1.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada Tahun 2023 Dinas Komunikasi d Kota Pematangsiantar melaksanakan 4 Program dan 8 Kegiatan serta 23 sub kegiatan, secara keseluruhan realisasi program/kegiatan dapat menghasilkan realisasi kinerja dengan capaian 100 – 120 % dengan rata dengan realisasi keuangan sebesar 93,58 %. Pada dasarnya program/kegiatan secara fisik dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan. Berdasarkan capaian tersebut dapat dihitung tingkat efisiensi, dimana efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya anggaran untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Analisis efisiensi anggaran terhadap capaian kinerja ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi realisasi anggaran untuk tercapainya seluruh kinerja yang dapat dilihat pada rumus perhitungan berikut:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{\% \text{ Rata-rata Capaian Kinerja}}{\% \text{ Rata-rata Capaian Penyerapan Anggaran}}$$

Kriteria pengukuran efisiensi yang digunakan adalah (1) Jika nilai efisiensi lebih besar atau sama dengan satu ( $\geq 1$ ), maka terjadi efisiensi; dan (2) Jika nilai efisiensi lebih kecil dari satu ( $<1$ ), maka efisiensi tidak tercapai. Dengan demikian, hasil analisis efisiensi anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar untuk Tahun 2023 adalah :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{120\%}{93,58} = 1,28$$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar terhadap capaian realisasi anggaran sebesar  $\geq 1$ , artinya terjadi efisiensi penggunaan anggaran.

Dapat dikatakan bahwa capaian realisasi keuangan tidak sepenuhnya terserap dikarenakan faktor efisiensi dalam pemanfaatan dana anggaran, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.8

## Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes), Kegiatan (output)	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	Anggaran	Realisasi Anggaran	% Capaian Realisasi Anggaran	SISA	Rincian Masalah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>Nilai AKIP OPD</b>	<b>CC</b>	<b>C</b>	<b>50 %</b>	<b>4.249.834,979</b>	<b>4.067.903,296</b>	<b>95,43 %</b>	<b>191.931,684</b>	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi Keuangan Perangkat daerah	1 Tahun (100%)	1 Tahun (100%)	100 %	2.239.141,524	2.231.030,032	97,29%	8.111,492	
1	Penyelesaian Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang mendapatkan gaji dan tunjangan	35 Orang/Bulan	25 Orang/Bulan	100 %	2.239.141,524	2.231.030,032	97,29%	8.111,492	
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun (100%)	1 Tahun (100%)	100 %	954.314,336	826.374,595	86,60%	126.939,741	
1	Perencanaan Komponen Instalasi Listrik penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4 Paket	4 Paket	100 %	46.213,690	30.899,184	66,86%	15.314,476	
2	Penyediaan Perlatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Perlatan dan perlengkapan kantor	4 Paket	4 Paket	100 %	112.921,525	93.435,461	82,74 %	19.486,064	
3	Penyediaan Perlatan rumah tangga	Jumlah paket Penyediaan Perlatan rumah tangga	4 Paket	4 Paket	100 %	48.473,950	38.561,267	81,61%	8.912,683	
4	Penyediaan Bahan logistik kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor	4 Paket	4 Paket	100 %	155.090,000	152.503,650	98,35%	2.586,350	
5	Penyediaan Barang cetakan dan pengandaan	Jumlah paket barang cetakan dan pengandaan	4 Paket	4 Paket	100 %	64.500,500	51.750,588	80,23 %	12.749,912	
6	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan peraturan dan perundang-undangan	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	101.598,000	38.256,685	37,65 %	63.341,315	
7	Penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi SKPD	Rapat Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	80 Laporan	80 Laporan	100 %	400.396,700	398.517,760	99,54 %	1.878,940	
8	Penatausahaan dlm/dn	Jumlah Laporan arsip dlm/dn	12 Laporan	12 Laporan	100 %	25.200,000				
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan barang Milik Daerah	1 Tahun (100%)	1 Tahun (100 %)	100 %	266.624,652	260.976,000	97,88 %	5.648,652	
1	Pengadaan Perlatan dan Mesin berbaye	Jumlah Unit perlatan dan mesin lainnya yang disediakan	15 Unit	15 Unit	100%	266.624.652	260.976,000	97,88 %	5.648.652	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outputmes) /Kegiatan (output)	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	Anggaran	Realisasi Anggaran	% Capaian Realisasi Anggaran	SISA	Rencian Masalah
			4	5	6	7	8	9	10	
1	2 Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah	3 Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 1 Tahun (100%)	5 1 Tahun (100%)	6 100 %	7 594.484.468	8 1.35.845.903	9 91,87 %	10 48.648.565	
1	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan jasa Surat menyurat	4 laporan	4 laporan	100%	9.200.000	9.214.608	99,29 %	6.539.200	
2	Penyediaan jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 Laporan	12 Laporan	100%	189.154.458	153.676.295	81,24 %	35.478.173	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	100%	386.060.000	372.955.000	96,60 %	13.105.000	
5.	Penyelenggaraan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun (100%)	1 Tahun (100%)	100 %	205.280.000	201.678.765	98,25 %	3.603.235	
1	Penyediaan Penyelenggaraan, pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	9 Unit	9 Unit	100%	92.940.000	89.256.765	96,14 %	3.683.235	
2	Penyelenggaraan mesin lainnya	Jumlah Perawatan dan mesin lainnya yang dipelihara	225 unit	225 unit	100%	112.420.000	112.420.000	100%	0	
2	PENGOLAHAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Jumlah konten/ informasi tentang kebijakan Pemerintah Kota dan Program pemerintah yang dapat diakses Publik	4000 Konten	8833 Konten	220%	3.285.058.106	2.103.085.020	68,37 %	3.285.058	
1	Penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi Publik	4000 Konten	8833 Konten	220%	3.285.058.166	2.103.085.020	68,37 %	3.285.058	
1	Penyelenggaraan konten dan perencanaan komunikasi publik	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan konten dan perencanaan media Komunikasi Publik	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	628.425.510	483.964.500	82,90 %	44.961.110	
2	Pengelolaan komunikasi publik	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1.869.262.000	1.495.366.997	85,34 %	273.895.003	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	Anggaran	Realisasi Anggaran	% Capaian Realisasi Anggaran	SISA	Rincian Masalah
			3	4	5	6	7	8	9	10
3	Pelayanan Publik	Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi Publik.	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	787.390.596	1.233.853.920	91,93 %	63.528.636	
3	<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>Persentase Layanan Publik yang terintegrasi pada website portal Pemerintah Kota pematang Siantar</b>	<b>80 %</b>	<b>80 %</b>	<b>100%</b>	<b>4.408.694.420</b>	<b>4.109.293.464</b>	<b>95,44 %</b>	<b>199.400.956</b>	
1	Pengelolaan government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	E- Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan Oleh Dinas Kominfo	100%	100%	100%	4.408.694.420	4.109.293.464	95,44 %	199.400.956	
1	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintah Yang dikelola	1 Pusat data	1 Pusat data	100%	2.108.110.604	1.595.625.829	94,69 %	112.473.775	
2	Koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi keamanan informasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	691.411.416	575.493.108	97,30 %	58.921.308	
3	Pengembangan dan proses pemerintahan berbasis elektronik	Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan elektronik yang dikembangkan	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100 %	305.210.000	304.650.000	99,81 %	560.000.000	
4	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah dokumen Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan ekosistem SPBE	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1.403.962.400	1.373.525.527	97,83 %	30.436.873	
2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>Jumlah metadata yang disejikan</b>	<b>10 Metadata</b>	<b>10 Metadata</b>	<b>100%</b>	<b>142.376.990</b>	<b>139.251.015</b>	<b>97,83 %</b>	<b>3.125.975</b>	
1	Penyelenggaraan Statistik sektoral dilingkup kabupaten kota	Tersedianya metadata yang disejikan dalam buku statistik sektoral	1 Buku	1 Buku	100%	142.376.990	139.251.015	97,80 %	3.125.975	
1	Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan analisis dan disseminasi data statistik sektoral	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan analisis dan disseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	142.376.990	139.251.015	97,80 %	3.125.975	
						12.086.984.555	11.309.632.794	93,58 %	776.431.761	

### **3.1.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Berikut analisis Program/Kegiatan dalam menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar.

#### **a. Sasaran yaitu “ Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik” yang diukur dengan indikator kinerja “Indeks SPBE”.**

Merujuk pada misi visi Walikota Pematangsiantar tahun 2022- 2027, dimana visi walikota Pematangsiantar yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif efisien, bersih responsive melayani berdasarkan orinsip good governance dan cooperative governance. Dengan sasaran meningkatkan kualitas pelayanan publik Sasaran ini menggambarkan tingkat atau indeks Sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Untuk capaian Tahun 2023, kinerja pada sasaran ini ditargetkan 2,85 dan terealisasi 28,4 % dengan capaian 99,64 %. Kinerja ini didukung melalui PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA , dengan Anggaran Rp. 4.408.694.420.- dengan realisasi anggaran Rp. 4.209.293.464 dengan kata lain capaian kinerja anggaran mencapai 95,47 %. Adapun faktor yang Menyebabkan tidak tercapainya 100 % indeks SPBE disebabkan tidak berjalannya audit TIK yang mana audit salah satu Domain Manajemen SPBE.

Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja indikator ini pada tahun 2024 diantaranya adalah:

1. Membuat Regulasi terkait Audit TIK
2. Menetapkan Surat Keputusan kepala Daerah tentang TIM Audit internal TIK
3. Berkolaborasi dengan APIP terkait proses audit TIK
4. Meningkatkan koordinasi, komunikasi dan kerjasama yang baik dengan para perangkat daerah dan pemerintah atasan terkait Indeks SPBE
5. Melakukan evaluasi dan monitoring terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

#### **b. Sasaran yaitu “Meningkatnya Kuaalitas Pelayanan Publik ” yang diukur dengan indikator kinerja “Persentase Penanganan Aduan SP4N lapor ”.**

kinerja strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar sebagaimana tercantum pada Renstra Perangkat Daerah 2022-2027.

Peningkatan kualitas Pelayanan Publik urusan menjadi penting dalam pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Untuk tahun 2023 target SP4N Laporan adalah 70 % dan realisasi 98,8 %.

Dengan rincian Laporan penagaduan yang masuk dari 01 Januari sampai 31 Desember 2023 laporan Belum terverifikasi adalah 0, laporan terdisposisi belum ditindaklanjuti adalah 1, laporan terdisposisi dengan proses adalah 18, laporan terdisposisi selesai adalah 66, laporan tertunda adalah 0 dan laporan arsip 7 dengan total laporan 92. Kinerja ini didukung oleh PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH dengan anggaran Rp. 4.249.834.979 dengan realisasi Rp. 4.057.903.295 dengan capaian kinerja 95,48 %.

Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja indikator ini pada tahun 2024 diantaranya adalah :

1. Melaksanakan pengelolaan opini publik melalui media komunikasi publik (media cetak,online, elektronik,social dan website).
2. Melaksanakan monitoring opini publik melalui kliping pemberitaan.
3. Melaksanakan desiminasi informasi publik mengenai prioritas kebijakan pemerintah pusat dan daerah.

**c. Sasaran yaitu "Meningkatnya Kuaalitas Pelayanan Publik " yang diukur dengan indikator kinerja "Indeks Keterbukaan Informasi Publik".**

Indikator Kinerja dengan Indeks Keterbukaan Informasi Publik dengan Target Tahun 2023 yaitu menuju informatif dengan realisasi menuju informatif. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar telah melakukan SELF ASSESSMENT QUESTIONNER (SAQ) MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2023,dengan indikator pertanyaan dan penilaian antara lain:

- Pengembangan Website
- Pengumuman Informasi Publik
- Pelayanan Informasi Publik
- Penyediaan Informasi Publik.

Penilaiannya merupakan penilaian mandiri dan objektif sesuai dengan kondisi sebenarnya dari Badan publik. Kinerja ini didukung oleh PROGRAM PENGELOAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK dengan anggaran Rp. 3.285.058.166 dengan realisasi Rp. 2.903.085.020 dengan capaian kinerja 88,37 %.

Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja indikator ini pada tahun 2024 diantaranya adalah :

**d. Sasaran yaitu “Meningkatnya Kuaalitas Pelayanan Publik ” yang diukur dengan indikator kinerja “Indeks Kepuasan Masyarakat”**

Pada Perjanjian Kinerja IKM dengan target 80 dan realisasi sebesar 80. Indikator Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survei IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Adapun jenis layanan yang dinilai pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar adalah

- Layanan Jaringan Internet gratis
- Pelayanan CCTV Pelintas
- Pelayanan Informasi Publik

Dari hasil form indeks kepuasan masyarakat yang telah dibagikan kepada 50 responden didapatkan hasil

Puas = 40 Orang

Kurang Puas = 10 Orang

Sehingga hasil yang didapatkan adalah  $40/50 = 80$ . Kinerja ini didukung oleh PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH dengan anggaran Rp. 4.249.834.979 dengan realisasi Rp. 4.057.903.295 dengan capaian kinerja 95,48 %.

Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja indikator ini pada tahun 2024 diantaranya adalah :

1. Memperkuat kebijakan daerah mengenai survey kepuasan masyarakat.
2. Melaksanakan survey kepuasan masyarakat sekali 6 bulan dan mengevaluasi hasilnya sebagai feedback atas pelayanan yang akan dilaksanakan.

- a. **Sasaran yaitu "Meningkatnya Kuaalitas Pelayanan Publik " yang diukur dengan indikator kinerja "Persentase OPD yang menggunakan statistic sektoral dalam menyusun dan mengevalausi Pembangunan daerah".**

Indikator ini ditargetkan dalam perjanjian kinerja yaitu 100 % atau 5 OPD. Persentase OPD yang menggunakan statsitik sektoral dalam menyusun dan mengevaluasi perencanaan dan pembangunan daerah sebanyak 5 OPD antara lain :

1. Dinas Sosial dan P3A
2. Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian
3. Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu satu Pintu
4. Dinas Pariwisata
5. Dinas Koperasi, UKM dan perdagangan.

Kinerja ini didukung oleh PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL dengan anggaran Rp. 142.376.990 dengan realisasi Rp. 139.251.015 dengan capaian kinerja 97,80 %. Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja indikator ini pada tahun 2024 diantaranya adalah :

- a. Memperkuat kebijakan tentang statsitik sektoral.
  - b. Melaksanakan inventarisasi data sektoral melalui Aplikasi SISADA (Sistem Informasi Satu Data Pematangsiantar)
  - c. Melakukan penguatan dan sosialisasi fungsi Pembina Data,Wali Data dan Produsen Data kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah
  - d. Melakukan peningkatan fitur pada Aplikasi SISADA.
  - e. Melakukan kolaborasi dengan seluruh OPD dan BPS Kota Pematangsiantar dalam Menyusun Buku Statistik Sektoral
- f. **Sasaran yaitu "Meningkatnya Kuaalitas Pelayanan Publik " yang diukur dengan indikator kinerja "Indeks KAMI"**

Pada perjanjian kinerja tahun 2023 sasaran ini dicantumkan dengan target 100 % atau skor 133 dan realisasi 103,7 atau skor 138, akan tetapi sasaran ini tidak memiliki program khusus yang dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023. Kinerja ini didukung Oleh PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH, disebabkan kurangnya anggaran dan capaian kinerja ini hanya berupa regulasi regulasi terkait keamanan informasi Pemerintah Daerah.

Alat evaluasi indeks KAMI ini dapat digunakan oleh organisasi dengan skala nasional, maupun yang berukuran kecil.

Penggunaan di instansi pemerintah dapat dilakukan ditingkat pusat maupun satuan kerja yang ada di tingkat direktorat jenderal, badan, pusat atau direktorat untuk mendapatkan gambaran mengenai kematangan keamanan informasi yang dijalankan. Evaluasi ini dianjurkan untuk dilakukan oleh pejabat yang secara langsung bertanggungjawab dan berwenang untuk mengelola keamanan informasi di seluruh cakupan instansinya. Proses evaluasi dilakukan melalui sejumlah pertanyaan dimasing-masing area dibawah ini :

- Kategori sistem elektronik yang digunakan instansi
- Tata Kelola keamanan informasi
- Pengelolaan resiko keamanan informasi
- Kerangka kerja keamanan informasi
- Pengelolaan aset informasi
- Teknologi dan keamanan informasi

Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja indikator ini pada tahun 2024 diantaranya adalah :

1. Memperkuat kebijakan-kebijakan terkait keamanan informasi (Peraturan Wali Kota, Surat Keputusan, Instruksi, SOP).
2. Melaksanakan sosialisasi keamanan informasi kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah.
3. Melaksanakan Audit Keamanan TIK Kota Pematangsiantar.
4. Melakukan tata kelola keamanan TIK sesuai dengan peraturan yang berlaku



Tabel 3.9

## Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target sd 2023	Realisasi Sampai 2023	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks SPBE	2,86	2,84	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	4.408.594.426	4.209.293.464	95,44 %
					Pangalioan E-government di Lengkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.108.110.604	1.995.626.829	95,44 %
					Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	591.411.416	575.690.108	94,66 %
					Koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik	305.210.000	304.650.000	97,30 %
					Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik	1.403.962.400	1.373.326.527	99,81 %
					Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pengembangan Ecosistem SPBE	142.376.990	139.251.015	97,83 %
		Persentase OPD yang menggunakan statistik dalam menyusun mengevaluasi pembangunan daerah	100% (5 OPD)	100% (5 OPD)	PROGRAM PENYELANGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	142.376.990	139.251.015	97,80 %
					Penyelenggaraan Statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten kota	142.376.990	139.251.015	97,80 %
					Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan pengolahan analisis dan desiminasi data statistik sektoral	142.376.990	139.251.015	97,80 %
		nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Co	C	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KOTA	4.249.634.979	4.057.903.295	95,48 %
		Indeks Kepuasan masyarakat	80	80				
		Persentase Penanganan Aduan SP4N lapor	70 %	98,8 %				

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target sd 2023	Realisasi Sampai 2023	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Indeks Kami	100 % (133)	103,7 % (138)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.238.141.524	2.231.030.032	97,29%
					Administrasi Umum	954.314.335	828.374.595	86,80%
					Perangkat Daerah Jasa Usaha	594.494.468	535.045.903	91,67%
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Unsur Pemerintahan Daerah	266.824.852	260.976.000	97,88%
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Unsur Pemerintahan Daerah	305.260.000	201.676.765	98,25%
					<b>PROGRAM PENGELUARAN INFORMASI KOMUNIKASI PUBLIK DAN</b>	<b>3.285.068.166</b>	<b>2.903.985.020</b>	<b>88,37%</b>
		Indeks Keterbukaan Informasi Publik			Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Daerah Kabupaten/Kota	3.285.058.166	2.903.985.020	88,37%
					Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	628.425.610	583.984.500	92,90%
					Pengelolaan media komunikasi publik	1.869.252.000	1.595.366.997	85,34%
					Pelayanan Informasi Publik	787.380.556	721.853.92	91,93%
Jumlah						12.065.964.555	11.309.532.794	93,88%

### 3.2 Realisasi Anggaran

Penyerapan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar Tahun 2023 sebesar Rp.11.309.532.794 atau dengan nilai persentase realisasi keuangan sebesar 93,58 % dengan rincian realisasi Belanja Operasional adalah sebesar Rp 10.156.979.294.- dengan presentase realisasi keuangan 93,14 % dan realisasi Belanja Modal Rp 1.152.553.500.- dengan presentase sebesar 97,09 %. Jika dilihat dari realisasi anggaran setiap sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada Indikator Persentase OPD yang menggunakan statistic sektoral dalam menyusun dan mengevaluasi pembangunan daerah dengan presentase 97,80 % dari realisasi belanja. Apabila dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran pencapaian sasaran yang relatif baik menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2023 telah mencukupi. Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.10**  
**Realisasi Anggaran Belanja Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2023**

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5	BELANJA DAERAH	12.085.964.555	11.309.532.794	93,58	7.672.233.276
5.1	BELANJA OPERASI	10.898.881.793	10.156.979.295	93,19	6.930.644.051
	JUMLAH BELANJA OPERASI	10.898.881.793	10.156.979.295	93,19	6.930.644.051
5.2	BELANJA MODAL	1.187.082.762	1.152.553.500	97,09	741.589.225
	JUMLAH BELANJA MODAL	1.187.082.762	1.152.553.500	97,09	741.589.225
	JUMLAH BELANJA	12.085.964.555	11.309.532.794	93,58	7.672.233.276

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Pematangsiantar Tahun 2023

**Tabel 3.11**  
**Realisasi Anggaran per Sasaran**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Anggera(Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks SPBE	2,85	2,84	4.408.694.420	4.209.293.464	95,44 %
		Persentase penanganan aduan SP4N lapor	70%	98,8 %	4.249.834.979	4.057.903.295	95,48 %
		Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Menuju Informatif	Menuju Informatif	3.285.058.186	2.903.085.020	88,37 %
		Indeks Kepuasan Masyarakat	80	80	4.249.834.979	4.057.903.295	95,48 %
		Persentase OPD yang menggunakan Statistik Sektoral dalam menyusun dan mengevaluasi perencanaan pembangunan Kota Pematangsiantar	100 % (5 OPD)	100%	142.376.990	139.251.015	97,80 %
		Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah (Indeks KAMI)	100 % (Skors 133)	103,7 % (skors 138)	4.249.834.979	4.057.903.295	95,48 %
Jumlah					12.085.964.555	11.309.532.794	93,56 %

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan informatika Kota Pematangsiantar Tahun 2023

## **BAB IV PENUTUP**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar telah secara optimal mengupayakan terselenggaranya kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi. Secara umum dapat terlihat bahwa pencapaian target kinerja sasaran dan program/kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dengan capaian kinerja yang sangat baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar Tahun 2023, yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan instrumen dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. Dan merupakan perwujudan konkrit tingkat pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan informatika Kota Pematangsiantar.

### **4.1. Keberhasilan Dan Kegagalan Kinerja**

Dari hasil pengukuran terhadap capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar selama tahun 2023 menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar Tahun 2022-2027 dan telah memenuhi sasaran strategisnya sebagaimana yang telah ditargetkan. Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar dapat dinyatakan berhasil. Hal ini dapat dilihat dari keseluruhan pencapaian indikator kinerja sasaran dengan capaian kategori sangat tinggi. Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2023 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Dinas Komunikasi dan informatika Daerah Kota Pematangsiantar melakukan langkah yang konstruktif dan konkrit melalui analisis dan evaluasi capaian kinerja agar dapat dilakukan perbaikan dan

penanganan pada tahun berikutnya. Kekurangan yang ada di Tahun 2023 menjadi catatan sebagai bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna bahan penyusunan perubahan Rencana Strategis lima tahun berjalan sehingga kinerja lebih efektif dan efisien pada tahun-tahun berikutnya.

#### **4.2. Kendala Dan Hambatan Pencapaian Kinerja**

Beberapa hal yang dapat diidentifikasi sebagai kendala, hambatan pencapaian kinerja sasaran strategis serta faktor yang mempengaruhi pencapaian target kinerja organisasi berdasarkan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya regulasi terkait Audit TIK yang menunjang nilai indeks SPBE yang menjadi kekurangan dalam penilaian Indeks SPBE Tahun 2023.
2. Bidang Layanan dan Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar Kota Pematangsiantar terus berupaya untuk melakukan perbaikan terhadap Aplikasi SISADA.
3. Belum terlaksananya monitoring opini dan aspirasi masyarakat terkait kebijakan dan program pemerintah Kota Pematang Siantar.
4. Belum Optimalnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi terkait pengelolaan data dalam penyusunan statistik sektoral.
5. Koordinasi dengan Badan Pusat Statistik terkait rekomendasi variabel, indikator dan metada statistik sektoral.

#### **4.3 Strategi Pemecahan Masalah**

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya, perlu dilakukan langkah langkah sebagai berikut:

1. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya aparatur pada Dinas Komunikasi dan informatika Kota Pematangsiantar;
2. Meningkatkan koordinasi dan pengelolaan data untuk menyediakan data dan informasi yang berkualitas dan terkini sebagai bahan Statistik Sektoral.
3. Melakukan koordinasi yang intensif dan efektif antara Dinas Komunikasi dan Informatika dan Perangkat Daerah dalam proses Sistem pemerintahan Berbasis elektronik, agar target pencapaian sasaran dapat tercapai.
4. Penyusunan rencana pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan lebih cermat untuk pencapaian target indikator kinerja dengan

mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan.

5. Melakukan langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran dan perkembangan masalah-masalah aktual di bidang perencanaan pembangunan.
6. Optimalisasi mekanisme manajemen internal Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar untuk secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.
7. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang telah disusun menjadi bahan evaluasi kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Pematang Siantar khususnya di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar, dan dijadikan sebagai pertimbangan atau bahan masukan dalam perencanaan pembangunan di tahun berikutnya.

Demikian LAKIP Dinas Komunikasi dan informatika Kota Pematangsiantar Tahun 2023, semoga dapat memberikan informasi maupun parameter untuk lebih memacu peningkatan kinerja aparatur Dinas Komunikasi dan informatika Kota Pematangsiantar.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA KOTA PEMATANGSIANTAR,



JOHANNES SIHOMBING, S.STP.M.Si  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 198103251999121001

## LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja
2. Indikator Kinerja Utama